

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Kota Sister City

- Kabupaten Kebumen bukan kota IHK sehingga BPS tidak menghitung inflasi Kabupaten. Angka Inflasi di Kabupaten Kebumen mengacu pada sister city Kota IHK terdekat yaitu Cilacap.
- Pada akhir triwulan empat tahun 2024 Tingkat inflasi month to month (m-to-m) sister city 0,52%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bulan November sebesar 0,3% (m-to-m), sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Cilacap bulan Desember 2024 sebesar 1,82 persen.
- Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,49 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu: telur ayam ras sebesar 0,11 persen; cabai merah sebesar 0,10 persen; terong dan kacang panjang masing-masing sebesar 0,05 persen dan kangkung sebesar 0,02 persen. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, yaitu: daging ayam ras sebesar 0,04 persen; rampela hati ayam dan ikan belanak masing-masing sebesar 0,01 persen.

2. Perkembangan Harga dan Indeks Perkembangan Harga Kab. Kebumen

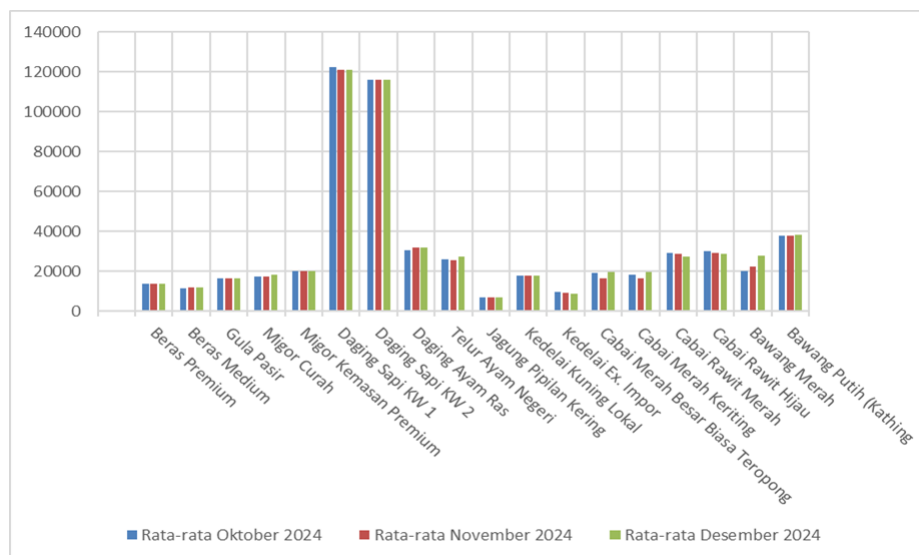
Perkembangan Harga :

- Perkembangan harga rata-rata bulanan 18 komoditas pangan strategis pada bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan harga terutama untuk 9 komoditas yaitu Beras Medium, Gula Pasir, Migor Curah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Negeri, Cabai Merah Besar Biasa Teropong, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih.
- Komoditas yang mengalami penurunan harga sejumlah 5 komoditas yaitu Daging Sapi Kw 1, Daging Sapi Kw 2, Kedelai Ex Impor, Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Hijau.
- Komoditas yang stabil sejumlah 4 Komoditas yaitu Beras Premium, Migor Premium, Jagung Pipilan Kering, Kedelai Kuning Lokal.
- Secara umum komoditas di Kabupaten Kebumen sepanjang triwulan 3 terkendali pada rentang HAP/HET di tingkat Konsumen kecuali untuk 3 komoditas yang mengalami kenaikan HET/HAP di tingkat konsumen yaitu : Migor Curah, Kedelai Kuning Lokal dan Bawang Putih. Rata-rata perkembangan harga sepanjang triwulan 3 secara rinci sebagai berikut :

Tabel : Perkembangan Harga Rata-Rata Bulanan 18 Komoditas pada Triwulan IV 2024

No	Komoditas	Satuan	Rata-rata Oktober 2024	Rata-rata November 2024	Rata-rata Desember 2024	% naik turun rata-rata Oktober ke rata-rata Desember 2024	HET/HAP Tingkat Konsumen
1	Beras Premium	kg	14.000	14.000	14.000	Stabil	14.900
2	Beras Medium	kg	11.726	12.000	12.000	naik 2,34%	12.500
3	Gula Pasir	kg	16.460	16.500	16.500	naik 0,24%	17.500
4	Migor Curah	kg	17.355	17.586	18.468	naik 6,41%	15.500
5	Migor Kemasan Premium	liter	20.000	20.000	20.000	Stabil	-
6	Daging Sapi KW 1	kg	122.645	121.000	121.000	turun 1,34%	140.000
7	Daging Sapi KW 2	kg	116.274	116.000	116.000	turun 0,24%	130.000
8	Daging Ayam Ras	kg	30.774	32.000	32.000	naik 3,98%	40.000
9	Telur Ayam Negeri	kg	25.984	25.672	27.371	naik 5,34%	30.000
10	Jagung Pipilan Kering	kg	7.000	7.000	7.000	Stabil	5.800
11	Kedelai Kuning Lokal	kg	18.000	18.000	18.000	Stabil	11.000
12	Kedelai Ex. Impor	kg	9.600	9.103	8.581	naik 10,61%	12.000
13	Cabai Merah Besar Biasa Teropong	kg	19.145	16.603	19.871	naik 3,79%	
14	Cabai Merah Keriting	kg	18.387	16.603	19.871	naik 8,07%	37.000 - 55.000
15	Cabai Rawit Merah	kg	29.177	28.638	27.371	turun 6,19%	40.000 - 57.000
16	Cabai Rawit Hijau	kg	30.000	29.310	28.839	turun 3,87%	
17	Bawang Merah	kg	20.000	22.397	27.758	naik 38,79%	36.500 - 41.500
18	Bawang Putih (Kathing)	kg	38.000	38.000	38.274	naik 0,72%	38.000

Grafik : Perkembangan Harga Rata-Rata Bulanan 18 Komoditas pada Triwulan IV 2024



Sedangkan prosentase perubahan harga rata-rata mingguan dari M 5 Oktober sd M4 Desember sebagai berikut :

- Pada Minggu ke 4 Desember jika dibandingkan dengan Minggu ke 3 Desember terjadi perubahan harga yang cukup signifikan untuk Bawang Merah yang sudah mengalami kenaikan sejak Minggu ke 2 November, Cabai Merah dan cabai rawit mulai mengalami kenaikan pada Minggu ke 3 Desember dan telur ayam ras mengalami kenaikan sejak Minggu ke 2 Desember
- Secara umum harga masih dalam rentang HET/HAP di tingkat Konsumen kecuali Minyak Goreng Curah dan Bawang Putih yang sudah naik melampaui HET/HAP sejak awal Triwulan 4, dan fenomena ini terjadi secara nasional.
- Prosentase perubahan harga mingguan pada M V Oktober sd M IV Desember sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

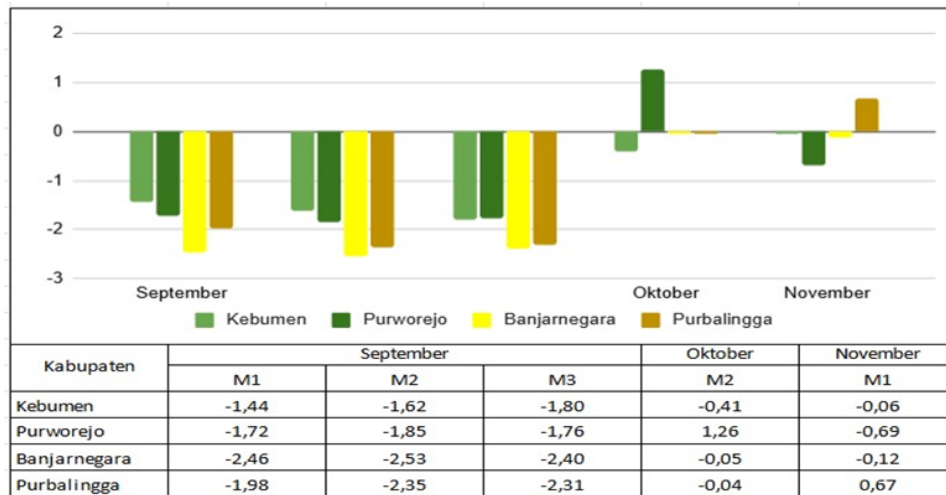
Tabel : Prosentase Perubahan Harga 10 Komoditas pada M 5 Oktober sd M 4 Desember

No	Nama Komoditas	% Minggu V Oktober vs IV Oktober	% Minggu I November vs V Oktober	% Minggu II November vs I November	% Minggu III November vs II November	% Minggu IV November vs III November	% Minggu I Desember vs IV November	% Minggu II Desember vs I Desember	% Minggu III Desember vs II Desember	% Minggu IV Desember vs III Desember
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Beras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Daging Ayam Ras	1,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Telur Ayam Ras	0	0	0	0	0	0	1,15	5,7	1,92
4	Bawang Merah	0	4	0,96	7,62	5,09	0,84	3,75	3,61	35,66
5	Cabai Merah	0	0	-1,18	-1,79	0	0	0	3,64	60,82
6	Cabai Rawit	0	0	0	-4	-2,78	-2,86	-0,74	0,74	4,17
7	Minyak Goreng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gula Pasir	0	0	0	0	0	0,73	0,18	0	0
9	Bawang Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Daging Sapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kab. Kebumen dan Kab. Sekitar

- IPH Kab. Kebumen pada M1, M2 dan M3 September mengalami penurunan sebesar -1,44%, -1,62% dan -1,80%. Pada M2 Oktober dan M1 November juga masih mengalami penurunan walaupun tidak sebesar bulan Oktober yaitu -0,41% dan -0,06%. Sedangkan IPH pada Bulan Desember kami belum mendapatkan update data dari BPS.
- IPH pada bulan September, Oktober dan November untuk Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Tabel : IPH Kebumen dan Kabupaten Sekitar September, Oktober dan November



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kelompok cabai dan bawang merah harus mendapat prioritas karena berfluktuasi baik pada triwulan 2 maupun triwulan 3 dan terus berlanjut sd triwulan 4. Khusus untuk triwulan 4 terjadi lonjakan harga bawang merah mencapai 38,79% dari harga di Bulan Oktober Rp.20.000/kg menjadi Rp.27.758/kg, walaupun kenaikan harga cabai dan bawang merah masih pada kisaran Harga Eceran Tertinggi/Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen (HET/HAP di tingkat konsumen)
2. Belum tersedianya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten untuk pengendalian harga cabai dan bawang merah di level produsen baik berupa subsidi harga maupun fasilitas distribusi (fasdis). Anggaran pengendalian harga di level produsen baru tersedia untuk komoditas padi melalui dana talangan. Sehingga ide champion cabai dan bawang perlu dipertimbangkan dengan sumber dana APBD Kabupaten.
3. Distribusi Migor di Kebumen masih sangat tergantung pada supplay dari Pedagang Besar, karena Kebumen belum ada Distributor (D2).
4. Toko Inflasi di Pasar Tumenggungan belum bisa operasional sesuai jam buka pasar, dikarenakan pengelola dalam hal ini BUMD PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mendapat penugasan untuk melakukan GPM hampir di semua desa di Kab. Kebumen
5. Perlu menambah jumlah kios pangan/toko pangan saat ini baru beroperasi 1 kios pangan di Kecamatan Alian.
6. Program Corporate Farming membutuhkan pendanaan dan belum berhasil mendapat dukungan permodalan dari Perbankan
7. Gudang SRG belum dapat dioptimalkan di tahun 2024, karena belum ada pengelolanya

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. GPM telah dilaksanakan sampai ke tingkat Desa. Jumlah GPM 434 lokasi dengan 263 lokasi diberikan subsidi harga dengan total subsidi harga sebesar Rp.1.047.997.750,- dan 171 lokasi tanpa subsidi harga.
2. Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng di pasar, BUMD Aneka Usaha bekerjasama dengan Pedagang Besar dan BULOG mendistribusikan Migor melalui GPM dan Kios Inflasi di Pasar Tumenggungan.
3. Untuk menjaga stabilitas harga cabai di level produsen, Dsitapang Kebumen telah

berkoordinasi dengan Dishanpan Jateng dan BAPANAS untuk menggunakan Fasilitas Distribusi dari alokasi anggaran Dishanpan Jateng dan BAPANAS. Hal ini dikarenakan di Tahun 2024 APBD Kabupaten belum mengalokasikan anggaran Fasilitas Distribusi.

4. Sebagai backup atas belum bisa beroperasinya Kios Inflasi di Pasar Tumenggungan setiap hari, telah dibuka kios pangan di kantor BUMD Aneka Usaha (550 meter dari Pasar Tumenggungan), dan di tahun 2025 direncanakan akan dibuka 8 kios pangan murah di lingkungan penduduk / bukan di pasar dengan lokus desa miskin/desa B2SA, daerah pantauan inflasi. Kios ini sekaligus sebagai pelaksana kegiatan fasdis untuk telur dan beras dari Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
5. BUMD Peduli Inflasi dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi aktif dari BUMD untuk mendukung pengendalian Inflasi dengan Alokasi pendanaan ± 85 juta, yang akan dilaksanakan pada M 3 Desember sd Bulan Januari, hal ini dengan pertimbangan pelaksanaan subsidi harga telah berakhir di tanggal 13 Desember 2024 (rekomendasi HLM TPID tanggal 9 Desember). BUMD Peduli Inflasi dilaksanakan bersamaan dengan GPM.
6. Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah telah disahkan dengan Perda Kabupaten Kebumen no. 13 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan yang dilakukan oleh Pemda, Pemdes dan Masyarakat. Selanjutnya akan disusun Perbup dan Juknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perda tersebut.
7. Gerakan menanam, pemanfaatan pekarangan untuk menanam cabai dan sayuran sudah dilaksanakan sampai level rumah tangga tetapi belum ada evaluasi pelaksanaannya.
8. Masif melakukan Gerakan B2SA, Gerakan Gemar Makan Ikan dan Gerakan Stop Boros Pangan dengan melibatkan PKK tingkat Kabupaten sd Desa, Organisasi Kewanitaan (Persit, Bhayangkari, Muslimat, Aisyiah), Instansi Vertikal, Sekolah, Hotel, Restoran dan Kelompok Pengolah Ikan (poklahsar)
9. Untuk menjaga harga beras sesuai HET maka perlu dilakukan monev terhadap TPK dan RPK Bulog terutama yang ada di lokasi pasar.
10. Untuk menjaga pasokan dan dalam rangka pengendalian inflasi telah dilaksanakan PKS/KAD oleh BUMD Aneka Usaha sebanyak 10 PKS/KAD (B2B) dan 20 PKS/KAD oleh Distapang dengan Poktan/Gapoktan dan BUMD Aneka Usaha (G2B)
11. Melaksanakan monev harga dan stok kebutuhan pokok secara rutin dan melaksanakan sidak ke pedagang besar agar tidak menahan harga dan tidak menaikkan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. GPM dengan pemberian subsidi harga sampai ke level desa efektif menjaga fluktuasi harga, hal ini terlihat dari 4 komoditas pangan yaitu Beras, Telur Ayam Ras, Gula Pasir dan Minyak Goreng Kemasan Sederhana tidak mengalami fluktuasi harga yang tinggi (dibawah 5%), Sedangkan komoditas yang tidak diberikan subsidi pada saat GPM seperti Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Migor Curah mengalami fluktuasi harga yang tinggi. Sehingga perlu kiranya dipertimbangkan di tahun 2025 untuk diberikan intervensi terhadap volatile food (Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih) dengan mekanisme yang berbeda dengan subsidi harga misal dengan fasdis sebagaimana telah dilakukan Dishanpan di Prov. Jateng.
2. Kolaborasi GPM dengan kegiatan lainnya di desa misal dengan Kampanye B2SA, Senam Bersama, Schreening Kesehatan, Perekapam KTP dll perlu diteruskan dan dimodifikasi dengan ide kreatif lainnya agar GPM tidak hanya menjaga keterjangkauan harga tetapi juga memberikan informasi edukatif lainnya berkaitan dengan pengendalian inflasi dan isu-isu strategis lainnya.

BUMD Aneka Usaha sebagai pelaksana GPM bersubsidi dan non subsidi untuk

3. bekerjasama dengan petani, peternak dan pedagang besar kebumen untuk memenuhi komoditas yang dijual di GPM, sehingga bisa membantu memasarkan produk petani dan peternak.
 4. Perlu perbaikan tata kelola di BUMD Aneka Usaha agar dapat membuka toko inflasi setiap hari di Pasar Tumenggungan dan Kios Inflasi di lokasi kantor BUMD Aneka Usaha.
 5. Perlu dipertimbangkan regulasi pemberian subsidi/fasdis pada produk tertentu yang dijual di Kios Inflasi/Kios Pangan Murah yang ditunjuk sehingga masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan murah tanpa menunggu pelaksanaan GPM. Inisiasi ini sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Dishanpan Prov. Jateng. Saat ini di Kebumen baru tersedia untuk komoditas beras SPHP di TPK/RPK.
 6. Perlu dilakukan evaluasi per Kecamatan terhadap keberlanjutan dan output Gerakan menanam pekarangan dengan komoditas penyumbang inflasi dan replikasi Program Agrismart yang telah ada di Halaman Belakang Pendopo'
 7. Kendala permodalan dalam pengelolaan corporate farming terkait dengan penggunaan agunan dalam kredit skema musiman perlu dicarikan solusi bersama.
 8. Update Early Warning System (EWS) pada Aplikasi SIMBOK perlu dilakukan kontinue agar informasi akurat, dan perlu dipertimbangkan alokasi anggaran untuk maintenance dan upgrade aplikasi SIMBOK, serta refreasing terhadap petugas survey dan entry data Aplikasi SIMBOK agar kaidah survey terjaga dan menghasilkan data yang akurat.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga agar program pengendalian inflasi berkesinambungan maka Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi mengacu pada 4 K dan merupakan kelanjutan Program Kerja TPID Kebumen Tahun 2024 dan diusulkan pada Program Kerja Tahun 2025 :

1. Perlu ditumbuhkan petani champion untuk komoditas penyumbang inflasi dengan alternatif pendanaan dari APBD Kab/APBD Provinsi maupun CSR (leading sektor Distapang)
2. Pengalokasian APBD Kabupaten untuk subsidi harga di level produsen/fasilitas distribusi untuk petani atau Insentif bagi petani di Tahun 2025 dianggarkan dari APBD Kabupaten (leading sektor Distapang)
3. Anggaran Subsidi Harga Pangan Strategis akan dilanjutkan pada Tahun 2025 (leading Sektor DisperindagKUKM) dan penyaluran bisa dibersamakan dengan Gerakan Pangan Murah (leading sektor Distapang)
4. Alternatif pendanaan Corporate Farming melibatkan perbankan dengan skema kredit musiman perlu dibahas ulang karena di Tahun 2024 belum ada titik temu antara Perbankan dan Manajemen Corporate Farming, perlu dipertimbangkan studi banding ke Kabupaten lain yang sudah melaksanakan (leading sektor Distapang dan Bagian PSDA Setda)
5. Inisiasi anggaran Insentif Petani yang terlibat pada program Corporate Farming agar GKP petani dapat diserap optimal oleh BUMD Aneka Usaha selaku off taker dan pengelola cadangan pangan daerah (leading sektor Distapang dan BUMD Aneka Usaha)
6. Mendorong peningkatan cadangan pangan daerah (beras) sebagaimana perhitungan BAPANAS untuk Kabupaten Kebumen di Tahun 2025 cadangan pangan yang harus disediakan 111,77 ton sementara baru tersedia anggaran di APBD untuk 20 ton. Perlu sinergi dan kolaborasi dengan Desa dan Masyarakat untuk bersama sama melakukan penguatan cadangan pangan yang dikelola Desa maupun Masyarakat (leading sektor

Distapang, Dinas PMD)

7. Optimalisasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menyerap gabah petani dan penerbitan resi dapat digunakan untuk permodalan petani. SRG diharapkan dapat dikelola oleh BUMD Pangan selaku offtaker Program Corporate Farming (Leading sektor DisperindagKUKM)
8. Perbaikan Penyusunan Neraca Pangan Daerah dengan memasukkan perhitungan stok barang di tingkat pedagang besar, karena selama ini perhitungan neraca pangan baru mempertimbangkan jumlah produksi (leading sektor Distapang dan DisperindagKUKM).
9. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kegagalan panen dan anomali cuaca (Leading sektor Distapang)
10. Mengoptimalkan lumbung pangan desa dan melakukan pengisian lumbung pangan desa menggunakan dana desa (Distapang dan Dinas PMD)
11. Menyusun prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan kementerian desa/provinsi terkait siskeudes (Distapang dan Dinas PMD)
12. BUMD Aneka Usaha untuk menjadi off taker komoditas pertanian dan menjalin KAD B to B baik untuk komoditas pertanian maupun non Sebagai tahap awal dapat menjadi mitra pasok BULOG dan Sebagai Distributor (D2) atau Pedagang Besar Minyak Goreng (leading sektor DisperindagKUKM, Distapang, BUMD Aneka Usaha, dan Bagian PSDA Setda)
13. Inisiasi Pelaksanaan Bussines Matching komoditas pertanian bisa dimulai dari komoditas padi/beras dengan mitra pasok BULOG, Pedagang Besar Beras, Perusahaan Katering, UMKM dan pelaku usaha lainnya agar beras hasil Program Corporate Farming dapat beredar dan dinikmati di Kabupaten Kebumen.
14. Menambah jumlah Toko/Kios Pangan yang dikelola oleh Masyarakat dan mengoptimalkan kinerja toko kendali inflasi di Pasar Tumenggungan.
15. Mendorong implemantasi Gerakan B2SA secara efektif dan menyusun Perbup atas Perpres 81 tentang Percepatan Penganekaragaan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Leading Sektor Distapang)
16. Sinergi peningkatan produksi dengan menyelaraskan pengelolaan jaringan irigasi dan pengaturan pelaksanaan Musim Tanam (leading sektor : Distapang, DPU PR, Komisi Irigasi)
17. Monev pada kegiatan yang masuk dalam tagging anggaran pengendalian inflasi (leading sektor BPKPD, Bappeda, Bagian PSDA Setda dan Stake Holder terkait)
18. Melaksanakan HLM TPID Setiap 3 Bulan sekali dan melaksanakan peningkatan kapasitas bagi anggota TPID (jika tersedia anggaran, kebumen belum pernah melaksanakan peningkatan kapasitas untuk anggota TPID)